

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam merupakan salahsatu agama terbesar didunia, dalam agama ini etika dan moralitas sangat dijunjung tinggi. Menurut Muhammad abduh, seorang pembaharu Mesir mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki tujuan untuk membawa perdamaian, kebahagiaan,dan kemakmuran dalam kehidupan manusia, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat (Abduh,2008:5). Sedangkan menurut Ali shariati, agama Islam adalah agama yang mengajarkan pembebasan dan keadilan sosial (Shariati, 1997:3). Islam sebagai agama yang membawa misi perdamaian,kebahagian dan keadilan sosial, Islam memiliki ciri tersendiri dalam ajaran dan sejarahnya.

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok didalamnya (Harold dalam Budiardjo,2007:48). Menurut Arief Budiman negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar didalam sebuah masyarakat (Budiman,1996:2). Bahkan menurut Max Weber negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warganya (Budiman,1996:7). Negara sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu memiliki keabsahan dalam berbagai tindakan, termasuk tindakan kekerasan bahkan

penyelewengan. Maka dari itu dalam menjalankan sistem kenegaraan, sebuah negara memerlukan dasar atau ideologi untuk menjadi pedoman, salahsatunya yang bisa dijadikan pedoman negara untuk menuntun kearah yang benar adalah agama.

Secara historis relasi agama dan negara memiliki konotasi negatif, terutama dalam peradaban barat, di abad pertengahan khususnya di eropa hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan konflikual, ketegangan antara agama dan negara berakibat pada peminggiran ruang privat(Ainun,2020:192). Dimana agama dimasukan kedalam ruang tersebut dikekang dan dipojokan.peminggiran agama ini kemudian melahirkan paham yang bernama Sekulerisme.

Namun yang terjadi dalam peradaban Barat, yang pada akhirnya meminggirkan agama pada ruang privat dan ritual semata, dalam sejarah Islam terjadi sebaliknya. Agama Islam menjadi salahsatu faktor kemajuan sebuah peradaban. Awal munculnya Islam pada abad ketujuh, kerajaan Bizantium yang merupakan ahli waris kerajaan romawi sedang mengalami kehancuran total. Pada saat yang sama Islam ketika itu sedang mengalami perkembangan pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Ilmu pengetahuan, pemerintahan dan aspek kehidupan lainnya mengalami kemajuan. Bahkan Millot mengatakan cukup menggelitik bahwa periode kegelapan besar eropa bertepatan dengan periode ketika dunia Islam mengalami perkembangan pesat dan mencapai puncaknya (Sudrajat,2019:231).

Secara historis Islam berbeda dengan agama lain, Islam sejak awal kehadirannya selalu bersinggungan dengan masalah politik kenegaraan. Tidak bisa

dinamakan bahwa kejayaan Islam dipenuhi dalam kisah politik. Dari penuturan sejarah sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai wafat dan digantikan oleh para sahabat yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai macam dinasti berhasil meraih berbagai kesuksesan. Yang lebih spektakulernya dibawah kepemimpinan beberapa tokoh, kaum muslimin sukses melakukan ekspansi dalam memperluas wilayah kekuasaanya.

Kenyataan historis tersebut menjadi dasar bagi adanya pandangan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan setelah kaum muslim berkenalan dengan Aryanisme Persia, ada sebuah adagium berbunyi “Islam adalah agama dan negara (Musdah,2010:14). Hal ini merupakan isyarat bahwa Islam dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar, perdebatan tentang Islam dan negara sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dimulai dengan dimuatnya tulisan pemikiran kenegaraan Islam dalam berbagai surat kabar atau penerbitan, kemudian dalam berbagai organisasi yang dibentuk untuk persiapan pembentukan negara Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI. Bahkan yang tak kalah sengit adalah perdebatan yang terjadi dalam sidang Konstituante.

Diskusi tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia tidak terlepas dari peran serta Muhammad Natsir. Ia merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang ulama, negarawan sekaligus politisi. Ia adalah pendiri sekaligus pemimpin dari partai Majelis syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Dalam pemikiran

Muhammad Natsir tentang relasi Islam dan negara, ia memandang bahwa agama bukanlah semata-mata tentang ritual ibadah dalam kehidupan sehari-hari seperti shalat, puasa tetapi agama juga meliputi kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, aturan dan patokan-patokan dalam Islam dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya perlu ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan negara. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW kepada umat Islam. Sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Alqur'an itu.

Dalam konteks Indonesia saat ini, politik Islam merupakan hal yang selalu dipinggirkan dan dianggap berbahaya. Terutama pasca Pilkada DKI 2017, Pilpres 2014 dan 2019. Kebangkitan politik Islam dianggap berbahaya karena bisa menimbulkan disintegrasi dan diskriminasi (Anam,2020:12). Gerakan aksi bela Islam yang berlangsung beberapa kali merupakan bukti menguatnya Islam politik dan konservatisme agama Islam di Indonesia, banyak yang khawatir terkait hal ini. Islam sering dianggap sebagai agama yang penuh dengan kekerasan dan terorisme. Padahal Islam adalah agama yang damai dan penuh cinta. Selain itu Islam adalah agama yang sempurna yang bukan hanya mengatur ritual ibadah semata, akan tetapi juga mengatur kaidah-kaidah dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Natsir merupakan tokoh pahlawan yang memiliki peran besar dalam perjuangan mempersatukan Indonesia. Mosi Integral Natsir yang diajukan oleh Natsir yang bertujuan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berhasil menyelamatkan Indonesia dari potensi perpecahan (Rickles,2001:217). Selain itu Natsir merupakan sosok ulama yang santun dalam berpolitik. Pemikiran Muhammad Natsir tentang relasi Islam dan Negara , sangat relevan dengan kondisi Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar didunia, juga dalam perjuangan kemerdekaannya umat Islam memiliki saham terbesar, maka perlu kiranya aturan aturan Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara. Menurut Natsir Outlook kita kaum muslimin, agama Islam bukanlah semata-mata satu “tambahan” atau satu ekstra yang harus dimasukan kedalam negara, akan tetapi Menurut outlook kaum muslimin negara menjadi perkakas bagi berlakunya hukum-hukum Islam (Natsir,1954:452).

Menurut Natsir Islam bersifat demokratis berarti Islam anti *istibdad*,anti *absolutisme*,anti sewenang-wenang. dalam pemerintahan Islam tidak berarti bahwa segala keputusan harus diserahkan kepada musyawarah *Majelis Syuro*. dalam negara Islam tidak akan dimusyawarahkan terlebih dahulu apakah yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan dan tidak mesti tunggu parlemen terlebih dahulu , apakah perlu pembasmian arak atau tidak. Tidak menunggu persetujuan parlemen terlebih dahulu untuk pembasmian judi dan kecabulan (Natsir,1954:453).

Menurut Natsir semua hal-hal yang sudah ada aturannya dalam Islam tidak perlu ditanya kan lagi diterapkan atau tidak. Hal hal tersebut tidak perlu diperbincangkan. Tapi yang perlu diperbincangkan menurutnya adalah bagaimana cara melaksanakan hukum-hukum tersebut seperti yang beliau ungkapkan, yang harus diperbincangkan ialah cara-cara menjalankan semua hukum-hukum itu,

adapun prinsip dan kaedah yang sudah tetap tidak boleh dibongkar-bongkar lagi (Natsir,1954:453).

Demokrasi sebagai sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia memang baik bahkan dalam perjalanan sejarah dari abad-keabad pun terlihat baik namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak sifat yang berbahaya dari adanya demokrasi, demokrasi yang sering diartikan bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat,rakyat yang berkuasa atau pengertian yang terkenal dari Abrahham Linclon dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Pada faktanya seringkali menyebabkan golongan golongan tertentu yang berkuasa, Natsir menjelaskan bahwa kita akui Demokrasi itu baik, akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada kerahiman insting-insting demokrasi (Natsir,1954:403).

Umat Islam cukup mengenal apakah akibatnya apabila Demokrasi merosot jadi *Party-Cratie* atau menjadi *Klik-Cratie* lengkap pula dengan segala main pencak dan sunglap dibelakang layarnya (Natsir,1954:452). Dalam meletakkan dasar negara Natsir memberikan Analisis yang final bahwa hanya ada dua pilihan dalam Meletakkan dasar negara yaitu “La-Diniyah” (sekulerisme) atau paham Agama yaitu Diniyah. Natsir memberikan gambaran bahwa seorang sekularis dalam menjalani hidupnya tidak memerlukan hubungan dengan tuhan, tuhan tidak perlu hadir dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan karena manusia bisa mengatur urusannya sendiri. Sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh *Kejahiliyahan* manusia semata-mata dan

dipusatkan pada kebahagiaan manusia dalam penghidupan sekarang ini (Natsir,2014:58).

Pemikiran sekulerisme sangat berbahaya menurut Natsir lantaran bisa menimbulkan berbagai penyakit ruhani dalam masyarakat, tidaklah mengherankan bahwa dalam kehidupan perseorangan sekulerisme menumbuhkan penyakit Ruhani (Natsir,2014:62). ketika dalam kehidupan masyarakat penuh dengan penyakit ruhani, maka dikhawatirkan kehidupan masyarakat tidak akan berjalan optimal.maka dari itu kehidupan negara perlu dilandaskan pada ajaran agama tertentu, agar manusia bisa berjalan optimal dan memiliki tempat bergantung.

Manusia perlu tempat bergantung agar hidupnya terarah. dalam bukunya Islam dan akal merdeka diceritakan seorang profesor Paul Ehrenest, yang meninggal diakibatkan bunuh diri dan sebelum bunuh diri ia membunuh anaknya terlebih dahulu, sangat mengherankan ,ketika seorang proffesor yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, dan bergaul dengan orang-orang yang berilmu mati dengan cara keji. Setelah ditelusuri meninggalnya prof Paul Ehrenest ini,diakibatkan karena kehilangan ideal dan tujuan hidup sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Menurut natsir ketika seseorang mendalami ilmu tanpa agama semakin hilang rasanya tempat berpijak apa yang kemarin benar sudah tak betul lagi apa yang betul sekarang besok salah pula (Natsir,1944:3). Maka dari itu kehidupan manusia memerlukan spirit keagamaan begitu juga dalam bernegara, negara sebagai alat memerlukan dasar agama untuk mencapai tujuannya. Pada dasarnya dalam Alqur'an tidak diatur secara spesifik mengenai masalah negara akan tetapi Islam mengatur dasar-dasar pokoknya saja. Sebagai mana yang

diungkapkan Natsir, yang diatur oleh Islam ialah dasar-dasar pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan keperluannya selama manusia masih bersifat manusia baik itu manusia zaman onta ,zaman kapal terbang, zaman kapal strafosfer (Natsir,1954:447).

Negara yang berlandaskan Islam kepala negaranya tidak harus disebut khilafah, khalifah atau pun sultan gelar pemimpin negara Islam tidak harus itu, apa saja boleh baik itu Presiden, *Amirul-Mukminin* , dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan gelar atau titel tidak menjadi syarat penting , *Chalifah* boleh, Presiden boleh, apa saja boleh asal sifat-sifat, hak dan kewajibannya adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam (Natsir,954:48) . Islam sebagai agama didalamnya telah lengkap dasar-dasar untuk mengatur sebuah negara sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan.Adapun hal-hal yang belum diatur dalam negara Natsir menyatakan boleh ditetapkan dengan cara-cara yang *munasabah* dan tidak melanggar hukum hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam buku *Capita Selecta* beliau menyatakan urusan-urusan yang diluar hal-hal agama semuanya boleh diatur menurut keadaan zaman, dengan cara cara yang *munasabah* dan tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan (Natsir,1954:449). Natsir menentang keras pemisahan agama dari dalam negara, Ia menyatakan yang mesti dipisahkan dari sana hanyalah kejahatan,maksiat, *istibdad*, kemusyrikan, kelobaan, kesombongan yang telah merajalela yang telah menghancurkan kekuatan umat, kemorosotan moral dan budi pekerti dan yang menutup pintu bagi kejayaan dunia dan akhirat (Natsir,1954:440).

Islam memiliki aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sempurna serta dapat menjamin kehidupan keberagaman berbagai golongan di dalam negara. Natsir merupakan tokoh yang dalam kehidupannya terkenal tegas namun santun dan beradab, terutama dalam menyampaikan gagasan. Natsir selalu menghormati pendapat oranglain, bahkan ketika pendapat tersebut berbeda dengan pandangannya sendiri seperti yang diungkapkan oleh Kusuma Natsir pemimpin yang memiliki integritas, keberanian, tegas dan santun terutama dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu berdiskusi dengan baik dan tidak memaksakan kehendak (Kusuma,2018:239).

Natsir tidak memaksa keyakinan oranglain untuk sama dengan dirinya, malahan memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing, hal ini terlihat dari tulisan beliau yang menyatakan bahwa bahwa dalam negara Islam , orang-orang yang tidak beragama islam mendapat kemerdekaan beragama yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada apa yang mungkin diberikan oleh negara-negara Eropa (Natsir, 1954:491). Sikap inilah yang perlu diterapkan dan ditanamkan di negara Indonesia saat ini, yang terkadang masyarakat maupun kelompok-kelompok tertentu kurang memiliki rasa toleransi pada keyakinan oranglain . Hal inilah yang seringkali berujung pada konflik baik verbal maupun fisik kepada semua pihak, yang pada akhirnya memunculkan polarisasi dalam kehidupan. Kurangnya toleransi dan munculnya polarisasi ini dapat menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai hubungan Islam dengan Negara dalam perspektif Muhammad

Natsir dengan melakukan Analisis teks pada tulisan-tulisan karya Muhammad Natsir. Penulis memberi judul penelitian ini “Relasi Islam Dan Negara Dalam Pemikiran Muhammad Natsir”. Pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka.

Penelitian terdahulu mengenai pemikiran Muhammad Natsir diteliti oleh, Aulia Annisa (2019) Tentang Pemikiran Muhammad Natsir tentang Pendidikan. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa dalam pemikiran Muhammad Natsir tentang pendidikan, dikotomi ilmu agama dan ilmu dunia harus dihilangkan. Dikotomi ilmu barat dan ilmu timur juga harus dihilangkan. Semua yang baik harus diterima meskipun dari barat. dan semua yang buruk harus disingkirkan meskipun itu datangnya dari timur.

Penelitian selanjutnya mengenai Muhammad Natsir dilakukan oleh Istikaromah (2021) Pemikiran Muhammad Natsir Pasca Kemerdekaan. Dimana Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Negara dalam pemikiran Muhammad Natsir adalah alat untuk menegakan Syariat Islam.

Penelitian yang berikutnya dilakukan oleh Elna Asmiranti (2022) Tentang relevansi pemikiran pendidikan Muhammad Natsir di era kontemporer seperti sekarang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemikiran Muhammad Natsir mengenai pendidikan yang integral dan tidak ada pemisahan tentang berbagai ilmu masih relevan diterapkan di era kontemporer seperti sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi topik permasalahan diatas adalah sebagai berikut ; Bagaimana pemikiran Muhammad Natsir mengenai relasi Islam dan negara ditinjau dari Analisis teks wacana Kritis Norman Fairclough?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemikiran Muhammad Natsir khususnya pemikiran tentang Relasi Islam dan Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep relasi Islam dan negara dalam pemikiran Muhammad Natsir yang dapat menjadi referensi dalam peningkatan wawasan akademik di Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat umum dapat memahami, dan lebih jauhnya dapat mengamalkan dalam sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari,

mengenai bagaimana seharusnya relasi Islam dan negara dalam pemikiran Muhammad Natsir.